

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era pemerintahan saat ini, akuntabilitas adalah hal penting dalam pelaksanaan pemerintah daerah baik dalam kinerja maupun pelaporan keuangan. Akuntabilitas dapat diyakini mampu merubah kondisi suatu pemerintah, dari kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan yang demokratis. Lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menggali potensi daerahnya sendiri, tanpa campur tangan Pemerintah Pusat.

Akuntabilitas menjadi hal penting bagi pemerintah daerah karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penggunaan kekayaan daerah dimana pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang berhak memperoleh informasi dan menjadi pengawas atas kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dan melaporkan hasil proses akuntansi keuangan daerah berupa laporan atas pengelolaan sumber daya yang telah diberikan dan menjadi bentuk

pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditentukan secara periodik (intruksi presiden no.7 tahun 1999).

Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, pendapatan daerah, belanja daerah, ketergantungan daerah, dan kinerja daerah. Pendapatan daerah merupakan penambah kekayaan bersih daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku *principal*, menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pendapatan daerah harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah dalam laporan keuangan sebagai bukti bahwa pendapatan daerah telah dikelola dengan baik oleh pemda. Jika semakin tinggi pendapatan suatu daerah, maka semakin tinggi pula untuk mendorong keinginan pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangannya.

Selain pendapatan daerah, belanja daerah juga dapat menjadi faktor dari akuntabilitas laporan keuangan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari berbagai macam, seperti belanja langsung dan belanja tidak langsung serta belanja untuk urusan wajib pemerintah maupun urusan pilihan yang memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan

memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik kepada publik. Semakin tinggi belanja daerah seharusnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan anggaran sesuai dengan kepentingan publik, yang artinya semakin tinggi pula keinginan pemerintah dalam menyampaikan laporan keuangan kepada publik.

Faktor lainnya adalah ketergantungan daerah, daerah yang telah melaksanakan desentralisasi secara baik adalah daerah yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Robbins dan Austin, (1986) dalam Pandansari, 2016) memaparkan bahwa tingkat ketergantungan yang tinggi cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan. Hal ini disebabkan adanya kepentingan pemerintah pusat untuk memantau apa yang dilakukan pemerintah daerah dan tingkat pencapaian kinerja atas alokasi dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Serta kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan daerah selain pendapatan daerah, belanja daerah dan tingkat ketergantungan daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bagian dari kebijakan yang strategis di Indonesia karena perbaikan akuntabilitas kinerja dapat berdampak pada upaya terciptanya *Good Governance* (Pabelum & Urip, 2008). Roda pemerintahan berasal dari rakyat, oleh karena itu kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja pemerintah yang baik agar pelayanan dapat ditingkatkan secara

efektif dan menyeluruh pada masyarakat. Keberhasilan kinerja penyelenggara pemerintah daerah dapat dinilai dari pembangunan, dimana pembangunan dari bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemerintah, sehingga dapat menuntut pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Melakukan evaluasi penyelenggara pemerintah merupakan proses pengawasan secara berkelanjutan dan pelaporan ketercapaian kegiatan agar kinerja penyelenggara pemerintah memuaskan.

Pemerintah daerah yang telah lama berdiri memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Untuk pelaporan keuangan kepada masyarakat, hanya dilakukan secara sukarela. Akan tetapi, dengan adanya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan atau pejabat publik harus bersifat terbuka dan bertanggungjawab atas setiap informasi publik, maka sudah sepatutnya pemerintah daerah melaporkan hasil kinerja keuangannya kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan transparansi informasi.

Suatu pemerintahan yang transparansi dan akuntabel seharusnya mampu menyediakan informasi yang terbuka untuk masyarakat. Dengan komunikasi dan teknologi informasi dapat mewujudkan prinsip transparansi sebagai indikator adanya kelola keuangan yang baik. Salah satu bentuk transparansi yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mengungkapkan laporan keuangan secara sukarela di internet sehingga seluruh *stakeholder* dapat memiliki kesempatan

dalam memperoleh informasi yang ada di lingkungan pemerintah. Pengungkapan sukarela laporan keuangan di internet dinilai efektif dan efisien dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pelaporan keuangan di internet (*Internet Financial Reporting*) adalah persepsi pihak eksternal bahwa organisasi berjalan sesuai norma, aturan dan keyakinan yang berlaku di masyarakat (Suchman, 1995 dalam Alhajjriana, Nor & Wijaya, 2017). Dengan adanya pelaporan keuangan di internet Pemda dapat meyakinkan *stakeholder* maupun masyarakat bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Serta, pelaporan adalah salah satu tahap penting dalam akuntabilitas publik (Mahmudi, 2011 dalam Alhajjriana, Nor & Wijaya, 2017).

Adapun penelitian tentang akuntabilitas laporan keuangan seperti yang dilakukan oleh Fontanella dan Rossieta (2014) mengungkapkan bahwa kinerja daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Menurut Mudhofar dan Tahar (2016) menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Purbasari dan Bawono (2017) menyatakan bahwa kinerja pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan dan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas. Menurut Erryana dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda

Dari penelitian sebelumnya dari Alhajjriana, Nor, & Wijayan (2017) melalui lima indikator diantaranya pendapatan daerah, jumlah anggota DPRD, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* Pemda,

sedangkan belanja daerah berpengaruh terhadap *internet financial reporting* Pemda dan *internet financial reporting* Pemda tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan sebagai variabel intervening. Perbedaan lainnya dari penelitian terdahulu yaitu terletak pada periode, objek dan variabel penelitian. Penelitian yang dilakukan Alhajjriana, Nor, & Wijayan (2017) adalah periode tahun 2012-2014 dengan objek penelitian seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini periode penelitian yang digunakan adalah periode 2014-2016 sedangkan objek penelitian difokuskan pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan menggunakan enam indikator diantaranya pendapatan daerah, belanja daerah, ketergantungan daerah dan kinerja daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan *Internet financial reporting* pemda sebagai variabel intervening.

Berdasarkan reseach gap diatas, penelitian yang akan dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengembangkan model baru dari model-model penelitian sebelumnya, yaitu Purbasari & Bawono (2017); Alhajjriana, Nor & Wijayan (2017); Agnesia (2016); Erryana & setyawan (2016); Fontanella & Rossieta (2014); Mudhofar & Tahar (2016). Oleh sebab itu, maka penelitian yang akan dilakukan saat ini akan menguji pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, ketergantungan daerah dan kinerja daerah terhadap akunabilitas laporan keuangan dengan *internet financial reporting* Pemda sebagai variabel intervening.

1.2 Rumusan Masalah

Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan daerah adalah tujuan penting dari reformasi sektor publik. Akuntabilitas menjadi penting bagi pemerintah daerah karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penggunaan kekayaan daerah dimana pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab. Penelitian tentang akuntabilitas laporan keuangan sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti akuntabilitas yang dipengaruhi oleh pendapatan daerah (Purbasari & Bawono, 2017), ketergantungan daerah (Erryana & Setiawan, 2016; Sugiarta, 2018; Fontanella dan Rossieta, 2014; Mudhofar dan Tahar, 2016), dan Kinerja Pemda (Purbasari & Bawono, 2017; Atriana, 2016; Fontanella dan Rossieta, 2014; Mudhofar dan Tahar, 2016). Serta IFR yang digunakan sebagai variabel yang memediasi (Alhajjriana, Nor & Wijaya, 2017). Berdasarkan penelitian tersebut maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan daerah berpengaruh terhadap *internet financial reporting* Pemda?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap *internet financial reporting* Pemda?
3. Apakah ketergantungan daerah berpengaruh terhadap *internet financial reporting* Pemda?
4. Apakah kinerja daerah berpengaruh terhadap *internet financial reporting* Pemda?

5. Bagaimana pengaruh pendapatan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan?
6. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan?
7. Bagaimana pengaruh ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan?
8. Bagaimana kinerja daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan?
9. Apakah *internet financial reporting* Pemda berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan?
10. Apakah *internet financial reporting* Pemda memediasi hubungan antara pendapatan daerah, belanja daerah, ketergantungan daerah dan kinerja daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai hal – hal berikut :

1. Mengetahui pengaruh pendapatan daerah terhadap *internet financial reporting* Pemda
2. Mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap *internet financial reporting* Pemda
3. Mengetahui pengaruh ketergantungan daerah terhadap *internet financial reporting* Pemda
4. Mengetahui pengaruh kinerja daerah terhadap *internet financial reporting* Pemda

5. Mengetahui pengaruh pendapatan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan
6. Mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan
7. Mengetahui pengaruh ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan
8. Mengetahui pengaruh kinerja daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan
9. Mengetahui pengaruh *internet financial reporting* Pemda terhadap akuntabilitas laporan keuangan
10. Mengetahui apakah pengaruh *internet financial reporting* Pemda memediasi hubungan antara pendapat daerah, belanja daerah, ketergantungan daerah dan kinerja daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi dan referensi dalam penelitian alam bidang akuntansi sektor publik khususnya tentang akuntabilitas laporan keuangan daerah. Selain itu, semoga bisa menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu ekonomi dalam bidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini semoga dapat berguna sebagai tambahan informasi yang bermanfaat dan dapat menjadi kajian yang lebih mendalam bagi peneliti selanjutnya.